



Buletin Parlementaria



Nomor 969/IV/VII/2017 Juli 2017

ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY



INDONESIA
KERJA
BERSAMA



**DPR Temukan Persoalan
Geografis Pelaksanaan DAK
di Kepri**

**Pengerjaan Proyek Nasional
Jangan Sembarangan**

Indonesia Ajak Delegasi AIPA Perkuat Kerjasama Maritim

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN

Indonesia Ajak Delegasi AIPA Perkuat Kerjasama Maritim

Indonesia mengajak seluruh delegasi Kaukus Antar Parlemen ASEAN/ Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke 9 untuk memperkuat kerjasama maritim dan resolusi damai terhadap konflik di ASEAN.

“Kaukus merupakan pintu masuk dalam rangka mencari harmonisasi Undang-Undang antar Anggota AIPA, serta menyusun mekanisme regional yang memungkinkan dalam mendorong kerjasama maritim antar negara kawasan,” ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat membuka Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-9 di Jakarta, Selasa, (18/7).

Menurutnya, masalah maritim sangat penting dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi melalui jalur perdagangan maritim yang vital. “kami percaya bahwa stabilitas dan keamanan merupakan fondasi yang kuat bagi penciptaan pembangunan ekonomi dan peningkatan akses kesejahteraan yang setara,”terangnya.

Dia menambahkan, tema kali ini menyoroti mengenai komitmen kawasan mengenai kawasan maritim. Seperti kita ketahui, Wilayah ASEAN 80 persen tertutup oleh laut, karena itu perlu diperkuat kerjasama masyarakat regional.

“Pertemuan kali ini juga dalam rangka

memastikan situasi dan keamanan serta stabilitas di laut. Selain itu, kita juga harus focus kepada Sumber Daya kelautan, karena itu merupakan bagian integral dari kehidupan dan terkait erat dengan ketahanan pangan, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara,”paparnya.

Pada kesempatan itu, Fadli Zon mengajak Anggota AIPA untuk bergabung dengan komunitas global dalam rangka meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan dan melestarikan sumber daya Laut kawasan.

AIPA Caucus Diharapkan Mampu Beri Solusi Konflik Negara ASEAN

Diharapkan sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus ke-9 yang berlangsung di Indonesia mampu memperkuat kerjasama parlemen se-Asia Tenggara dalam menangani persoalan yang bisa menjadi potensi konflik.

“DPR RI menjadi tuan rumah untuk caucus meeting AIPA. Pada kesempatan ini tema yang diangkat

mengenai maritime cooperation dan peace and civility di ASEAN. Dalam persoalan konflik resolusi, pertemuan ini dilaksanakan dimulai tadi malam, hari ini dan besok penutupan,” ujar Fadli.

Dihadapan 10 parlemen se-ASEAN, Politisi Gerindra ini menegaskan bahwa saat ini masih terjadi beberapa persoalan yang dihadapi negara ASEAN seperti sengketa laut, narkoba hingga perdagangan manusia. Diharapkan hasil sidang AIPA ini mampu memberikan solusi bagi persoalan tersebut di masing-masing negara.

“Di ASEAN, Indonesia salah satu negara yang 80 persen adalah kawasan maritim, ini mempunyai potensi besar untuk hal positif seperti perdagangan. Di sisi lain juga ada potensi konflik terkait sengketa, seperti di Laut Cina Selatan yang punya dampak langsung di ASEAN,” terang Fadli.

Terhadap banyak persoalan yang belum diselesaikan, negara se-Asia Tenggara memiliki komitmen untuk bekerjasama menangani berbagai persoalan tersebut. “Kemudian masalah penyelundupan narkoba yang selalu terjadi melalui laut dan juga human trafficking dan lain-lain. Di ASEAN, kita mempunyai prinsip untuk bekerja sama perbaikan dalam menangani persoalan yang bisa menjadi potensi konflik tersebut,” jelasnya.

Melalui pertemuan ini, lanjut Fadli, diharapkan terjadi sinkronisasi dalam mencari solusi dalam berbagai persoalan di ASEAN. “Salah satu yang ingin disinkronisasi misalnya terkait kesepakatan itu bagaimana di parlemennya atau legislasinya, apakah legislasinya sudah mendukung. Pertemuan ini salah satunya untuk membahas hal tersebut,” sambung Fadli.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen AIPA Isra Sunthornvut berharap pertemuan ini mampu menghasilkan kesepakatan yang mampu mendorong kemajuan di Asia Tenggara. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang telah menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Sidang AIPA Caucus ke-9 ini. Kaukus Antar Parlemen ASEAN terdiri dari 10 negara di ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Bangladesh, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar. ■



Wakil Ketua BKSAP Juliari Batubara didampingi Anggota BKSAP DPR lainnya menandatangani rekomendasi hasil Sidang AIPA Caucus ke-9 di Jakarta,



Novanto Siap Ikuti Proses Hukum

Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan, pihaknya siap mengikuti proses hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pasca ditetapkannya sebagai tersangka oleh KPK.



Pimpinan DPR saat jumpa pers terkait penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK

“Saya sudah melihat di media bahwa saya sudah ditetapkan oleh Ketua KPK sebagai tersangka, dan sebagai warga negara yang baik maka saya akan mengikuti dan taat pada proses hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” paparnya di Gedung Parlemen, Selasa, (18/7/2017).

Menurut Setya Novanto, Sampai hari ini pihaknya belum menerima putusan penetapan tersangka tersebut. “Tadi pagi saya sudah mengirmkan surat kepada Pimpinan KPK untuk segera dikirim putusan yang menetapkan saya sebagai tersangka,” ucap Novanto.

Novanto mengatakan, apabila sudah menerima surat keputusan dari KPK tersebut, pihaknya akan mempelajari dan mengkonsultasikannya dengan kuasa hukumnya dan keluarga. “Saya percaya Allah SWT yang tahu apa yang saya lakukan. Insya Allah apa yang dituduhkan itu semuanya tidak benar. Nanti akan kita lihat dalam proses-proses hukum selanjutnya,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon mengatakan sejauh tidak ada perubahan dari partai atau fraksi sebagai perpanjangan partai politik yang mengusung, maka tidak akan ada perubahan dalam konfi gurasi kepemimpinan di DPR RI. “Jadi boleh disimpulkan, Pimpinan DPR RI tetap seperti sekarang ini,” ujar Fadli.

Untuk diketahui, bahwa di dalam Undang-Undang MD3 atau Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 sudah diatur mengenai pergantian Pimpinan DPR, yaitu didalam Pasal 87. dikatakan bahwa terdapat tiga alasan pemberhentian Pimpinan DPR, yakni karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan karena diberhentikan.

Apabila Pimpinan DPR tersangkut masalah hukum, maka didalam Pasal 87 ayat 2 khususnya huruf c, sudah diatur bahwa pemberhentian itu bisa dilakukan bila telah ada putusan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. ■

(dep/sc), foto : Jaka/hr

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,

Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra

Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Rizka Arinindy, Supardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief

Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO

Bagus Mudjiharjanto

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom

DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Mujiono

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Remon,Yuliana Puspita,

Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menerima tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi-Fraksi DPR atas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2016

Pemerintah Sambut Baik Persetujuan DPR Bahas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2016

Pemerintah diwakili Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indarwati menyambut baik persetujuan seluruh fraksi DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2016 pada tahap selanjutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Hal tersebut, disampaikan Sri Mulyani saat menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI atas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2016 dihadapan sidang Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Selasa (18/7/2017).

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi langkah kita dalam melaksanakan konstitusi dan amanah dari rakyat



Perppu Ormas Berlaku Jika Dapat Persetujuan DPR RI

Indonesia, sehingga kita dapat terus menjaga kepercayaan rakyat terhadap janji Republik Indonesia tercinta,” ungkapnya.

Dalam sambutannya Menkeu menyampaikan, pemerintah sangat menghargai pendapat dan masukan seluruh fraksi agar pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, sehingga keuangan negara digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia. Pencapaian pembangunan tahun 2016 yang disampaikan oleh pemerintah antara lain : pertumbuhan ekonomi mencapai 5.02 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,8 persen.

Selain itu pendapatan per kapita mencapai sebesar Rp 47.96 juta/tahun. Lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 45.14 juta per tahun. Gini Ratio juga dinilai pemerintah membaik dari tahun 2015 sebesar 0,402 menjadi sebesar 0.397.

Di sisi lain pemerintah menanggapi pandangan dan pertanyaan F-GERINDRA, F-PKB, F-PKS, dan F. NASDEM mengenai realisasi tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2016. Pemerintah menjawab, di tengah perekonomian global yang masih lemah, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 menunjukkan perbaikan dan tren positif yaitu tumbuh sebesar 5,02 persen, dibandingkan dengan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 4,8 persen.

Adapun mengenai pandangan dan pertanyaan dari F-PDIP, F-GERINDRA, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, dan F-NASDEM terkait pendapatan negara termasuk pendapatan perpajakan, pemerintah menjelaskan, realisasi pendapatan negara TA 2016 meningkat Rp 47,9 triliun atau 3,2 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2015. Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.284,9 triliun, PNBPN sebesar Rp261,9 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp8,9 triliun. ■

(eko/so), foto : Iwan Al/Tr

Peraturan Presiden Penganti Undang-Undang (Perppu) merupakan diskresi pemerintah. Namun apakah Perppu yang dikeluarkan tersebut akan terus berlaku, menurut Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, hal tersebut tergantung persetujuan dari DPR RI.

“Hari ini (walaupun sejak kemarin sudah diumumkan) pemerintah secara resmi sudah mengirimkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Sehingga secara otomatis Perppu tersebutlah yang berlaku dan menggantikan undang-undang No. 17 tahun 2013. Namun apakah Perppu tersebut akan terus berlaku? Hal itu tentunya harus menunggu persetujuan DPR RI,” ujar Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Sesuai perundang-undangan yang berlaku Perppu tersebut akan disampaikan secara resmi dalam Sidang Paripurna DPR RI mendatang. Kemudian akan diproses dalam jangka waktu sekali masa sidang.

“Sebentar lagi masa sidang akan habis, jadi kemungkinan masa sidang berikutnya baru akan diproses. Hasilnya tergantung dari pembicaraan di DPR. Kalau DPR menyetujui maka tetap akan menggunakan undang-undang yang baru yakni Perppu No.2 Tahun 2017 itu,” tegasnya.

Namun kalau tidak disetujui, sambungnya, akan kembali ke Undang-Undang sebelumnya, UU No. 17 Tahun 2017. “Di sini DPR harus memberikan jawaban, kalau tidak dijawab pun artinya Perppu itu diterima. Bahkan bisa juga dibentuk pansus yang merupakan gabungan sepuluh fraksi yang ada di DPR RI ini. Di pansus inilah nanti akan diketahui suara atau pendapat masing-masing fraksi,” pungkasnya. ■

(ayu/sc), foto:Kresno/Tr



Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto saat memberikan keterangan pers

Pengembangan Panas Bumi Indonesia Masih Lambat

Pengembangan panas bumi di Indonesia masih lambat, karena itu perlu adanya Political Will pemerintah. Dalam 34 tahun terakhir, hanya sebesar 1613,5 MWe yang dieksplorasi atau hanya rata-rata 47,5 MWe per tahun.

Demikian mengemuka dalam Kunjungan Spesifik Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto ke Kantor Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi Badan Geologi, Kementerian ESDM di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/07/2017).

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita tidak boleh terlena, panas bumi kita cukup banyak tapi belum kita manfaatkan sehingga ini menjadi suatu hal yang harus kita pikirkan,” ungkap Agus.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, salah satu hambatan pengembangan panas bumi di Indonesia adalah banyak pengembang panas bumi yang memiliki izin, namun tidak melakukan tahapan eksplorasi.

Minimnya data bawah permukaan (pengeboran) di wilayah kerja panas bumi sebelum lelang, menjadi risiko yg sangat tinggi dalam pengembangan berkelanjutan. Sisi lain, Badan Geologi sebagai salah satu badan yang mengambil peranan penting untuk menganalisis sumber panas bumi, tidak memiliki peralatan yang canggih untuk eksplorasi kedalaman 2000m (deep slim hole).

Terkait hal itu, politisi Demokrat ini mendorong pemerintah pusat terlibat dalam menyediakan data pengeboran/eksplorasi Wilayah Kerja Panas Bumi untuk penawaran (lelang). Mengingat, pengembangan panas bumi masih berfokus pada wilayah kerja yang temperatur tinggi.

“Sehingga ini memberikan minat bagi para kontraktor untuk meminimize resiko, pemerintah harus turun tangan disini. Pemerintah bisa berkerjasama dengan perusahaan yang mempunyai deep slim hole tapi untuk analisa bisa dilakukan di badan geologi,” tuturnya.

Nantinya, lanjut Agus, biaya resiko bukan hilang begitu saja, tetapi bisa kita bebankan kepada kontraktor yang akan melaksanakan pengeboran.

Sementara dari sisi regulasi, Agus mendesak penyelesaian nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kemenkeu tentang Kerjasama Penyelenggaraan Fasilitas Penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi.

Sebelumnya, Kepala Bidang Panas Bumi Arif Munandar, mengatakan dengan adanya MoU tersebut pengembangan panas bumi bisa dipercepat. Investor tidak meraba-raba lagi ada atau tidaknya panas bumi di kedalaman ini, seperti membeli kucing di dalam karung.

“Jika sudah ada bor eksplorasi, walaupun deep slim hole ada tidaknya fluida sudah terkonfirmasi. Mudah-mudahan, dengan dorongan DPR mempercepat terselesainya MoU antara Kemenkeu dan Kementerian ESDM. Harapan kami itu, makin cepat selesai regulasi, makin cepat kita actionnya,” tandasnya. ■

(arm/sc), foto : Anne/fr.



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi Badan Geologi, Kementerian ESDM di Bandung, Jawa Barat.



Anggota Pansus Pelindo II DPR saat kunjungi KPK

Pansus Pelindo II Serahkan Hasil Audit BPK ke KPK

Panitia Khusus Angket DPR RI tentang Pelindo II DPR RI menyerahkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diterima pansus pada Juni lalu, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pansus meminta agar hasil audit investigasi pertama itu ditindaklanjuti oleh KPK.

Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka mengatakan, laporan audit BPK itu meliputi perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja antara Pelindo II dan Perusahaan asing bernama Hutchison Port Holding (HPH), Proyek Kalibaru, dan Global Bond senilai Rp 20,8 triliun.

“Seharusnya jika tidak diperpanjang pada 2019, maka JICT sesungguhnya 100 persen bisa menjadi milik Indonesia. Namun diperpanjang pada 2015 dengan nilai kontrak yang lebih rendah dibandingkan kontrak pertama tahun 1999. Dan anehnya, kontraknya tetap

berlaku dari 2019 hingga 2039,” kata Rieke, usai pertemuan dengan Pimpinan KPK, di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017).

Merujuk pada audit BPK, masih kata Rieke, terindikasi kuat telah terjadi pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai Rp 4,08 triliun dari kekurangan upfront fee yang seharusnya diterima PT Pelindo II.

Kemudian persoalan lainnya, tambah Rieke, global bond pada proyek Kalibaru yang bunganya harus dibayarkan pertahun sebesar Rp 1,2 triliun. Menurutnya, dana itu bisa digunakan untuk membangun

pelabuhan-pelabuhan lain.

Belum lagi, masih kata politisi F-PDI Perjuangan itu, biaya pembangunan proyek Kalibaru yang mencapai lebih dari Rp 20 triliun lebih, dianggap terlalu mahal. Terutama jika dibandingkan dengan pembangunan Terminal Teluk Lamong, yang dengan kapasitas sama hanya membutuhkan biaya kurang lebih Rp 6 triliun.

Rieke memastikan, dari hasil pembahasan temuan pemeriksaan investigatif BPK atas perpanjangan Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Pelabuhan PT Pelindo II berupa kerjasama usaha dengan PT JICT menyimpulkan bahwa telah terpenuhi dua unsur atas tindak pidana korupsi berupa adanya dugaan kuat penyimpangan atas Peraturan Perundang-undangan dan indikasi terjadinya kerugian keuangan negara sebesar US \$ 306 juta atau sekitar Rp. 4,08 triliun.

“Dari pansus sendiri, kita melihat ada indikasi bahwa terjadinya indikasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,08 triliun, sehingga kami menilai telah memenuhi tindak pidana korupsi,” tegas politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sementara itu Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, terkait laporan pansus sebelumnya, pihaknya telah menetapkan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka. Dalam pertemuan itu, ia juga mengungkapkan perkembangan kasusnya.

“Terkait laporan tentang dengan Terminal Koja, proyek Kalibaru dan kemudian perpanjangan JICT, Priok Baru dan Lamong, dan kemudian global bond itu, kami akan segera menindaklanjuti dan kami akan membentuk tim gabungan yang terdiri dari KPK, tentunya klarifikasi terhadap BPK, dan mengajak teman-teman PPATK,” jelas Agus.

Agus pun akan memperbarui perkembangan penyelidikan kasus itu, sehingga baik pansus maupun KPK dapat saling mengontrol dan memonitor. Ia pun berharap dalam pengembangan kasus ini, tak ada intervensi politik dari siapapun.

“Karena kami bersepakat kasus ini bisa jadi pintu masuk untuk membenahi tata kelola BUMN. BUMN bisa menjadi tolak punggung perekonomian negara, dan memberikan keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indonesia,” harap Agus. ■

(w.sif/sc), foto: Iwan/hr

Komisi I DPR Apresiasi Peta Baru NKRI

Ketua komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi langkah pemerintah memproses penetapan peta baru laut cina selatan diganti laut Natuna utara

“Bagian yang diberi nama baru ini adalah wilayah ZEE Indonesia. Indonesia memang memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu, tapi ini masih dilakukan di pihak internal Indonesia, dan nanti pada gilirannya akan dilakukan di tingkat internasional, melalui mekanisme yang telah ada,” kata Kharis kepada Parlemen, Rabu (19/7/2017).

Politisi F-PKS itu berharap penamaan ulang dan penambahan wilayah memberikan dampak positif bagi Tanah Air. Menurutnya, terdapat beberapa dampak. Pertama, meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan diri bangsa kita dalam mempertahankan teritorial wilayah NKRI. Kedua, bertambahnya potensi sumber daya alam yang bisa dieksplorasi untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

“Kemudian, semakin jelasnya batas negara sehingga mengurangi potensi konflik dengan negara-negara yang berbatasan langsung seperti Singapura dan Filipina. Kami juga mengharapkan agar peta baru ini menjadi tugas tambahan bagi TNI dan Bakamla untuk mengamankan batas-batas teritorial tersebut,” kata Kharis.

Kharis menilai, adanya reaksi



Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari

dari pihak Tiongkok terhadap hal ini, seharusnya tidak mempengaruhi kebijakan yang sudah diambil karena itu adalah hak kedaulatan Indonesia yang harus dihormati oleh Tiongkok. Untuk itu, pihaknya akan terus mengawasi prosesnya dan akan memanggil Menteri Luar Negeri untuk menjelaskan perkembangannya agar kepentingan nasional tetap dapat maksimal diraih.

“Saya melihat bahwa dari sisi dalam negeri, secara teknis kita memang perlu senantiasa memutakhirkan nama dari fitur-fitur rupa bumi Indonesia, seperti sungai,

laut, atau pulau. Dan tidak ada masalah yang politis dengan hal ini. Kalau dari sisi pergaulan luar negeri, mungkin bisa juga dibutuhkan diskusi lebih lanjut agar pertimbangan lebih komprehensif,” jelas politisi asal dapil Jateng V itu.

Sebelumnya diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menetapkan peta baru bagi NKRI. Langkah itu, merupakan hasil dari serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kemaritiman dan melibatkan berbagai kementerian serta lembaga terkait perundingan perbatasan maritim Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, mengatakan, ada beberapa hal baru yang menyebabkan peta NKRI harus diperbaharui. Pertama, ada perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku yakni antara Indonesia-Singapura sisi barat dan sisi timur, serta perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi akan berlaku

Kedua, masih kata Havas, adanya keputusan arbitrase Filipina dan Tiongkok yang memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau yang kecil atau karang yang kecil yang ada di tengah laut yang tidak bisa menyokong kehidupan manusia tidak memiliki hak ZEE 200 mil laut dan landas kontinen. Sehingga ada beberapa pulau kecil milik negara tetangga Indonesia yang hanya diberikan batas teritorial 12 mil laut. ■

(sf/sc), foto: Jaka/hr

DPR Temukan Persoalan Geografis Pelaksanaan DAK di Kepri

Panja DAK (Dana Alokasi Khusus) Komisi IX DPR RI menemukan persoalan geografis selain berbagai permasalahan lainnya terkait pelaksanaan program DAK di Provinsi Kepulauan Riau.



Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja DAK Komisi IX DPR, Marwan Dasopang

“Pemerintah sudah menganggarkan 5 persen dari APBN untuk kesehatan. Sebagian dari 5 persen itu disalurkan melalui DAK. Kami Panja DAK Komisi IX ingin memastikan bahwa program tersebut dapat berjalan dengan baik. Namun sayangnya setelah kami mengunjungi beberapa daerah kami menemukan berbagai permasalahan terkait DAK. Begitupun yang kami temui saat ini di Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja DAK Komisi IX, Marwan Dasopang di Kantor Sekda Provinsi Kepri, Jumat (14/7/2017).

Dilanjutkan Marwan, persoalan tumpang tindih dan ketidaksinkronan juga ditemui dalam pelaksanaan DAK ini selain hambatan-hambatan administrasi lainnya. Khusus di Kepri ini ada permasalahan spesifik yakni terkait geografis Kepri yang notabene terdiri dari kepulauan-kepulauan.

“Lokasi antar pulau yang cukup berjauhan membuat permasalahan tersendiri bagi Kepri yang tidak ditemui di provinsi lain di Pulau Jawa. Misalnya penyerapan yang terhambat akibat lokasi yang berjauhan, ditambah minimnya alat angkut laut yang besar untuk mengangkut berbagai bantuan peralatan atau perlengkapan medis. Sementara tadi dilaporkan Sekda Kepri dan jajarannya, bahwa pemerintah pusat melalui SK Menteri Keuangan menyatakan bahwa per 21 Juli 2017 mendatang penyaluran atau penyerapan DAK minimal sudah harus 75 persen dari dana yang sudah dicairkan. Ini menjadi hambatan tersendiri bagi Kepri. Belum lagi menyangkut biaya dinas yang ditentukan pusat untuk daerah Kepri yang mereka nilai sangat jauh dari biaya sesungguhnya di lapangan,” papar politisi dari Fraksi PKB ini.

Terkait temuan dan laporan-laporan tentang berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program DAK di Provinsi Kepri ini, Marwan yang didampingi oleh anggota Panja lainnya seperti Oky Asokawati, Betti Shadiq Pasadigoe dan Hang Ali ini berjanji akan menampung dan merumuskannya dalam rekomendasi. Rekomendasi inilah yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kesehatan RI. ■

(ayu/usc), Foto: Ayu/hr



Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo

Pengerjaan Proyek Nasional Jangan Sembarangan

Dalam pelaksanaan pengerjaan proyek infrastruktur nasional, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meminta agar dilakukan secara hati-hati dan jangan sembarangan. Hal itu dinyatakannya terkait musibah amblasnya jalan Tol Palembang - Indralaya yang sedang dalam tahap pengerjaan.

“Kami melihat kalau pihak pelaksana di lapangan sudah berusaha untuk berhati-hati, hanya saja memang terdapat jalur Saluran Udara Tekanan Tinggi (SUTET) yang juga merupakan proyek nasional yang melewati ruas Tol tersebut,” ucap Sigit usai berdialog dengan Direksi PT. Utama Karya dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (13/07/2017).

Sigit menjelaskan, masalah elektrifikasi Sumatera itu sudah akan dipindahkan, tetapi memang belum selesai dilakukan. “Karena kebutuhan untuk dapat digunakan sebagai jalan fungsional pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka dilakukan percepatan dalam pengerjaannya sehingga terjadi amblas,” ujarnya.

Politisi PKS ini melihat peristiwa itu sebagai accident. Lokasi yang amblas tersebut bukan akses utama jalan tol, melainkan akses jalan penghubungnya. Oleh karenanya dari sisi keselamatan dan progres kerjanya tidak terganggu.

“Ini kecerobohan dalam tanda petik, yakni pelaksana kerja diminta agar cepat menyelesaikan pekerjaannya agar jalan bisa dipakai secara fungsional. Hal itulah yang jadi pemicu indikasi kecerobohan yang terjadi,” ungkapnya.

Ke depannya, dalam rapat dengan pihak kementerian terkait, Komisi V DPR akan mengingatkan bahwa untuk jalan-jalan yang akan dipercepat pengerjaannya agar bisa dipakai secara fungsional, maka harus dilihat dahulu secara detail mengenai persoalan yang dihadapinya. “Masalah ini harus dijadikan pelajaran agar tidak terjadi lagi hal yang seperti itu,” tandas Sigit.

Sementara pihak Utama Karya selaku kontraktor dan pihak BPJT juga telah menyatakan bahwa mereka akan berupaya keras agar masalah serupa tidak terjadi di kemudian hari. ■

(dep.mpi), Foto: Ryzan/hr

SOAL IMPOR DAGING KOMISI IV PANGGIL PEMERINTAH

Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti laporan dari Dewan Peternakan Rakyat Nasional (Dapernas) terkait adanya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada peternak rakyat. Hal tersebut terungkap saat Komisi IV DPR RI menerima audiensi dari Dapernas di ruang rapat Komisi IV, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (18/7/2017).



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron berdialog dengan anggota Dewan Peternakan Rakyat Nasional (Dapernas)

“Tentu kami akan menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang diungkapkan Dapernas yang didalamnya terdapat berbagai komunitas peternak, seperti perhimpunan peternak sapi, kerbau, domba dan unggas,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron yang memimpin rapat tersebut.

Salah satu pengaduan Dapernas, lanjut Herman, adalah terkait keluarnya peraturan presiden (PP) No.4 tahun 2016 Pasal 6 ayat 1 C, dimana pemerintah melakukan impor daging dari negara yang belum terbebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK). Hal itu jelas bertentangan dengan UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH).

Pada kesempatan itu Ketua Dapernas, Teguh Boediyana mengungkapkan kebijakan impor daging kerbau asal India yang jelas bertentangan dengan UU No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam Pasal 36 e tercantum, bahwa pemasukan hewan dan produk hewan dapat dilakukan (diperbolehkan) jika berasal dari suatu negara atau zona dari suatu negara.

Realisasinya, pemerintah mengizinkan impor dengan menggunakan landasan hukum PP No.4 Tahun 2016 tentang pemasukan ternak dan produk hewan, dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan.

“India sebagai negara pengekspor daging terbesar dunia, menurut organisasi kesehatan hewan dunia (OIE) hingga kini masih belum bebas penyakit mulut dan kuku,”ungkapnya.

Herman menambahkan, selama harga keekonomisan di tingkat peternak tidak terjamin di pasar, maka hal ini akan terus menjadi masalah, kenapa? karena terintervensi oleh impor. Hampir separuh kebutuhan nasional dipenuhi oleh impor. Impor dengan harga yang sangat rendah, terlebih lagi dengan hadirnya daging kerbau tadi, yang bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Belum lagi didalamnya persoalan perbibitan, bakalan dan pakan ternak. Selama semua itu tidak dibangun, tentu akan tergantung dengan impor.

“Selama semua itu tidak dicarikan solusinya, makan akan menjadi masalah di peternak. Dan selama itu pula akan membuat para peternak kita terbelakang. Bahkan ada sebuah lelucon yang mengatakan jangan-jangan kenaikan jumlah rakyat miskin termasuk di dalamnya para peternak. Para peternak yang dalam sisi kemampuan usahanya tidak ekonomis, tidak mampu mengangkat kemampuan hidupnya (life survival), namun disisi lain kebutuhannya sendiri meningkat tajam,” pungkas politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini. ■

(ayusci), Foto: Kresnohr

Komisi VI DPR Soroti PMN PT KAI dan PT Djakarta Lloyd

Komisi VI DPR RI menyoroti rencana penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) dan PT Djakarta Lloyd (persero). Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

“Komisi VI dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyepakati untuk melakukan pendalaman mengenai usulan penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dalam perubahan APBN Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Kerja berikut di Masa Sidang V Tahun 2016-2017,” papar Teguh Juwarno, sebagai salah satu kesimpulan Raker dengan Menteri Keuangan yang mewakili Menteri BUMN,

membahas RAPBN 2017, di Gedung DPR, Kamis (13/07/2017).

Menurut Teguh Juwarno, terkait Perubahan APBN 2017, Komisi VI mencermati usulan PMN, yang sampai saat ini Komisi VI belum menerima pemberitahuan terkait masalah ini. “Kita akan melakukan pembahasan lebih dalam terkait mengapa diberikan PMN kembali kepada KAI dan Djakarta Lolyd,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang



Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno berdialog dengan Menkeu yang mewakili Menteri BUMN usai rapat kerja

mewakili Meneg. BUMN menyebutkan, total PMN yang didapat PT KAI adalah Rp 2 triliun, dan untuk PT Jakarta Lloyd Rp 379,3 miliar. Usulan PMN ini juga telah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar)

pada pembahasan terkait asumsi dasar APBN-P 2017 pada Rabu (12/7/2017). “Karena PMN bagian pos pembiayaan, maka PMN ke BUMN di bawah Kemenkeu dan di bawah BUMN juga dibahas. Tapi tidak detail per instansi,” jelas dia.

Berdasarkan hasil rapat Banggar, PMN kepada PT KAI sebesar Rp 2 triliun dan Jakarta Lloyd Rp 379,3 miliar telah disetujui dengan catatan. Karena itu catatan tersebut harus dibahas terlebih dahulu di Komisi VI DPR selaku mitra kerja Kementerian BUMN dan yang mengurus PMN.

Sri Mulyani menyebutkan, PMN kepada

KAI Rp 2 triliun akan digunakan untuk menunjang kemampuan BUMN Kereta Api dalam menjalankan pembangunan sarana dan prasarana proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek).

“Sudah dibahas di koordinasi Kemenko Luhut dan K/L (Kementerian/Lembaga) terkait agar bisa menjalankan pembangunan LRT Jabodebek sesuai target 2018-2019. Tapi karena keterbatasan belanja negara maka ada konversi PT KAI dan belanja di K/L Kemenhub dan PSO dalam pelaksanaan pengelolaan LRT Jabodebek,” ungkap dia.

Sedangkan PMN non tunai yang didapatkan Jakarta Lloyd sebesar Rp 379,3 miliar, kata Sri Mulyani, berasal dari konversi utang subsidiary loan agreement (SLA) yang dikonversi menjadi ekuitas. “Untuk PMN di APBNP 2017 kami mohon disetujui, PMN untuk KAI Rp 2 triliun dan non tunai Jakarta Lloyd sebesar Rp 379,3 miliar,” tutup dia. ■

(as,mp) Foto: Naefture/jhr

SKK Migas Diminta Persiapkan Strategi Tingkatkan Lifting Migas

Kepala SKK Migas diminta mempersiapkan strategi meningkatkan lifting Migas dalam kondisi harga minyak dunia yang sedang rendah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, Kepala SKK Migas, dan Dirut PT Pertamina (Persero).

“Komisi VII mengingatkan kembali sejauhmana yang dicapai dalam pengembangan dan pengendalian lifting Migas, serta sejauh mana Dirjen Migas memantau pemanfaatan dan pembangunan floating production, storage and offloading (FPSO) untuk kegiatan produksi migas Offshore,” papar Gus Irawan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/07/2017).

Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang didapat Komisi VII bahwa realisasi pendistribusian BBM, dari H-14 hingga H+5 lebaran terdapat kenaikan signifikan terutama pada H-9 sebesar 64%, apabila dibandingkan pada realisasi pendistribusian BBM periode yang sama tahun lalu. Sedangkan pada realisasi pendistribusian pada H+5 lebaran terdapat kenaikan sebesar 40% dibandingkan



Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu

periode yang sama tahun lalu. “Untuk itu, Komisi VII ingin mengetahui lebih komprehensif tentang distribusi BBM dan elpiji pasca lebaran,” katanya.

Selanjutnya, Gus Irawan menjelaskan bahwa rencana pembangunan infrastruktur hilir migas termasuk untuk hasil produksi minyak dan gas dalam negeri, telah dibahas berkali-kali dengan Dirjen Migas, dan Direktur PT Pertamina. Dimana Komisi VII mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk lebih komprehensif dan tetap sasaran dalam menyiapkan program pembangunan kilang mini yang menjamin efisiensi dan efektifitas penyediaan BBM jangka panjang.

Dalam rapat yang mengagendakan pengembangan dan pengendalian lifting serta pemanfaatan dan pembangunan Floating Storage and Regassification Unit (FSRU) dan floating production, storage and offloading (FPSO) tersebut, Dirut Pertamina diminta untuk memberikan data detail terkait RDMP (Refinery Development Master Plan) project dan Grass Root Refinery (GRR) beserta dengan sumber pembiayaannya.

“Untuk itu, dalam forum rapat ini Komisi VII meminta penjelasan yang komprehensif kepada Dirjen Migas dan PT Pertamina tentang kemajuan pembangunan infrastruktur hilir migas dan masalah-masalah yang dihadapi,” ujarnya.

Selain itu, Komisi VII juga telah meminta kepada Dirut Pertamina untuk segera menyelesaikan sengketa tanah di wilayah Barito Timur, Makasar dan Nusa Tenggara Timur. Bitung, secara berkeadilan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.

“Pada kesempatan ini, Komisi VII meminta penjelasan terkait hal perkembangan penyelesaian sengketa lahan di Makasar, Bitung, dan Barito Timur,” imbuh politisi Partai Gerindra dapil Sumatera Utara II ini. ■

(as/sc), foto: Ryan/hr



Komisi V Dukung Anjungan Cerdas

Tim Kunker Komisi V DPR dipimpin Ketua Fary Djemy Francis meninjau pembangunan anjungan cerdas di Desa Nglingsis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur

Komisi V DPR RI mengapresiasi dan mendukung penuh langkah pemerintah dalam pembangunan rest area terintegrasi dengan berbagai fasilitas yang disebut Anjungan Cerdas. Hal ini terungkap pada kunjungan tim ke lokasi pembangunan anjungan cerdas di Desa Nglingsis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Jumat (14/7/2017)

Anjungan yang dibangun berdampingan dengan Bendungan Tugu ini dinilai berjalan sesuai rencana dan sangat tepat berlokasi di Trenggalek karena berada di tengah-tengah jalur utama Yogyakarta-Malang.

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengingatkan Kementerian PUPR untuk berhati-hati dalam pembangunan dan tetap memperhatikan potensi kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi pengerjaan proyek tempat singgah (rest area) Anjungan Cerdas di ruas jalan nasional Trenggalek-Ponorogo.

“Karena kemacetan lalu lintas tidak hanya terjadi di kota besar dan sekarang sudah mulai bergeser ke daerah-daerah. Jadi tolong diperhatikan desainnya maupun pintunya, apalagi luasnya hanya tiga sampai empat hektar,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan memaparkan proyek ini ditargetkan dalam waktu tiga tahun mulai 2016 hingga 2018 dengan alokasi anggaran Rp 60 miliar.

Menurutnya, Anjungan Cerdas nantinya akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung yang memadai dan



Komisi XI DPR Soroti Pengelolaan Keuangan Daerah NAD

Komisi XI DPR RI menyoroti pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kunjungan tim ingin mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah yang bersumber dari APBN dan sejauhmana pelaksanaan tugas BPK dan BPKP sebagai pengawas keuangan dan pembangunan.



Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan

Di NAD, Tim menggelar pertemuan dengan Pemrov NAD, Kepala Kantor Perwakilan BPK dan Kepala Kantor Perwakilan BPKP NAD. (14/07). “Kunjungan ke Provinsi NAD ini dalam rangka membahas masalah pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBN,” kata Marwan di Gedung Kanwil BPK, Banda Aceh.

la mengatakan satu-satunya lembaga negara yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, UU telah memberikan kebebasan dan kemandirian kepada BPK yang meliputi kebebasan untuk melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan.

“Hal-hal yang menjadi masukan adalah kemandirian mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan sarana pendukung lainnya yang memadai, BPK memerlukan nilai-nilai dasar yang meliputi integritas, independensi dan Profesionalisme sebagai kode etik BPK yang berlaku bagi anggota BPK, pemeriksa dan pelaksana BPK lainnya,” paparnya.

Inilah yang sebetulnya, lanjut Marwan, yang mendorong BPK untuk melakukan audit kinerja. Karena kalau WTP sifatnya merupakan laporan keuangan sesuai dengan standard atau tidak. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana uang yang sudah dikeluarkan itu efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan maupun kesenjangan ekonomi yang ada.

Sementara, instrument evaluasi untuk pembangunan sudah ada, secara regulasinya berlaku di seluruh Indonesia. “Mungkin yang sedang dibangun BPK ini adalah bagaimana instrument evaluasi itu dilakukan secara online artinya tidak perlu tatap muka tapi dapat dilakukan secara online sehingga setiap saat evaluasi pemeriksaan dapat dilakukan oleh BPK,” jelasnya.

Dan terkait dengan keterlambatan transfer dan laporan pertanggungjawaban, kekurangan sumber manusia ini tentunya menjadi sumber evaluasi yang kita bahas bersama dengan hasil kunjungan dari daerah lain, sehingga dana desa ini dapat lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan BPK NAD Isman Rudy mengapresiasi kedatangan kunjungan Komisi XI DPR ini. “Sesuai dengan amanah konstitusional, BPK Perwakilan NAD melaksanakan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Selama tahun 2015-2017 telah melaksanakan 153 pemeriksaan terdiri dari tahun 2015 sebanyak 57 objek, tahun 2016 sebanyak 62 objek dan tahun 2017 sebanyak 34 objek.” kata Isman.

Disamping itu, hasil audit atas kegiatan pembangunan di daerah tercermin dari berbagai temuan pemeriksaan yang termuat dalam Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP) Keuangan, secara khusus pemeriksaan atas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah telah dimuat dalam LHP.

“Kinerja atas efektivitas tata kelola pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui beberapa hal yang telah dilaksanakan dan kelemahan yang ditemukan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.” jelas Isman. ■

memiliki tujuh fungsi, mulai dari rest area, pendidikan, rekreasi, pengembangan ekonomi lokal, konservasi dan beberapa fungsi lain.

“Nanti dilengkapi dengan lahan parkir yang cukup luas, kemudian amphi theatre, wifi, tempat bertoko dan beberapa fasilitas lainnya,” ujarnya lebih lanjut.

Lebih lanjut harapan Komisi V bahwa Anjungan Cerdas ini juga akan menjadi salah satu pusat pengembangan perekonomian lokal dan diharapkan rest area semacam ini bisa dibangun lebih banyak di daerah lain. ■

(ran/so).Foto: Rizka/hr

(hr/so).Foto: Eka Hindra/hr

Serapan Anggaran Harus Mampu Wujudkan Target Pembangunan

Wakil Ketua Komisi XI Jon Erizal minta BPK untuk melakukan sosialisasi, bahwasannya hasil audit WTP belum tentu bebas dari pelanggaran hukum. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI dalam rangka Pengawasan Keuangan Daerah ke Kantor Perwakilan BPK dan BPKP Provinsi Gorontalo.



Wakil Ketua Komisi XI DPR Jon Erizal

tapi bagian dari penyelewengan kinerja.

“Kami berharap agar selama ini masyarakat melihat, kalau sudah WTP itu artinya bebas terjadi pelanggaran hukum, sebenarnya itu berbeda sekali,” ujar Ketua Tim Kunspek Komisi XI tersebut, di Kantor BPK Gorontalo, Jumat (14/7/2017) malam.

Rapat kerja yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim ini juga menekankan pentingnya korelasi antara

mengatasi kesenjangan ekonomi, karena ketimpangan ekonomi antara kaya dan yang miskin menimbulkan kecemburuan sosial. Dia menegaskan masalah ini harus diatasi.

“Mudah-mudahan dengan kunjungan kerja hari ini, persoalan-persoalan yang dirasakan oleh pemerintah daerah, oleh teman-teman pemeriksa bisa kita angkat ke tingkat nasional, sehingga pusat mengetahui, dengan begitu bisa mendapat solusi-solusi yang lebih tepat guna,” papar Jon.

Dia juga mempertanyakan kembali tentang tugas audit yang diemban oleh lembaga audit negara ini, audit yang berkaitan dengan laporan keuangan dan audit berbasis kinerja. “Ini juga sedang kita minta kepada BPK untuk segera melakukan audit kinerja. Kemudian yang ketiga audit dengan tujuan tertentu. Kalau sudah mendalami itu bisa ketahuan yang mana bukan pelanggaran dan seterusnya,” ungkap Jon.

Dalam waktu yang bersamaan Kunspek Komisi XI ini terbagi menjadi tiga tim, pertama ke Gorontalo, kedua ke Jambi, dan ketiga ke Aceh. Ke Gorontalo Anggota Komisi XI yang turut serta melakukan pengawasan yakni, Aditya Anugraha Moha, Heri Gunawan, Krisna Mukti, dan Achmad Hatari. ■

(eko/sc)/Foto: Eka/htr

ia menjelaskan, bahwa WTP adalah proses yang dilakukan secara wajar dalam bidang administrasi, artinya bukti-bukti transaksi, hal-hal yang berkaitan dengan kaidah-kaidah akuntansi telah dipenuhi. Di sisi lain jika ada orang menyalahgunakan kewenangan atau pelanggaran lainnya belum masuk ke wilayah audit keuangan

serapan anggaran dengan dampak nyata kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Menurut Jon serapan anggaran daerah yang baik harus mampu mewujudkan target pembangunan dan mengatasi kemiskinan. Sehingga dengan begitu, tidak hanya penilaian WTP yang dicapai tapi bisa

BPK dan BPKP Jambi Diminta Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa

Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng mengatakan, BPK dan BPKP diminta untuk memberikan pemahaman kepada Kepala Desa terkait pengelolaan dana desa yang digelontorkan melalui APBN, agar dana tersebut dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran serta sesuai dengan peraturan.

“Untuk melakukan pengawasan alokasi dana desa ini, telah disiapkan sebuah aplikasi yang bernama SISKEUDES untuk mempermudah aparat desa dalam pengadministrasian keuangan desa yang telah terintegrasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri secara gratis,” paparnya saat memimpin pertemuan dengan Perwakilan BPK dan BPKP Provinsi Jambi, di Jambi, Jum’at (14/7/2017).

Lebih lanjut Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng, menjelaskan “agar setiap desa menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam penatausahaan keuangan desa.” Melchias Markus Mekeng juga meminta BPKP memperkuat Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang



Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng



ada di Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan penggunaan dana desa.

Politisi Golkar ini menjelaskan dari jawaban BPK Perwakilan Provinsi Jambi, bahwa BPK belum melakukan audit pelaporan Dana Desa karena perbedaan persepsi. Dalam jawabannya BPK Jambi mengatakan seharusnya desa menyusun perencanaan lima tahun APBD Desa (anggaran pendapatan dan belanja desa) yang mendapat ijin persetujuan dari kabupaten terlebih dahulu, laporan pertanggung jawaban disusun berdasarkan realitas APBD Desa yang sudah disahkan.

Pemeriksaan BPK Provinsi Jambi terhadap Dana Desa terlapor pada Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada laporan kepatuhan No.13.C/LHP/XVIII. JMB/5/2017 tanggal 29 Mei 2017 pada

Temuan pemeriksaan Nomor 1 dengan judul "Alokasi Anggaran untuk Dana Desa kurang lebih sebesar Rp 25,00 miliar, serta penggunaan Dana Desa sebesar Rp 433,23 juta dan alokasi Dana Desa sebesar Rp 191,04 Juta untuk kegiatan aparatur desa ke luar daerah tidak sesuai ketentuan," ungkapnya.

Sementara, kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi dalam audit/pemeriksaan Dana Desa yang menjadi bagian dari pemeriksaan LKPD tidak signifikan, kecuali jika telah ditemukan fraud (penipuan). Namun jika ditemukan fraud, BPK Perwakilan Provinsi Jambi diwajibkan menambah prosedur atau melakukan pemeriksaan.

Menanggapi hal ini, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Parna menyatakan bahwa untuk Dana Desa, BPK berharap agar Komisi XI DPR RI memiliki

solusi pengaturan lebih lanjut mengenai standarisasi pelaporan Dana Desa yang akuntable dan auditable. Sehingga persepsi pemerintah desa, pengawasan dan pemeriksaan tidak berbeda-beda. Dan pertanggungjawaban keuangan desa lebih memungkinkan dalam menilai keberhasilan tujuan dari pemberian Dana Desa yang tidak sedikit jumlahnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XI Wilgo Zainar menambahkan masyarakat diminta proaktif mengawasi pembangunan yang ada di desanya masing-masing. Jika terdapat dugaan korupsi, agar segera laporkan ke aparat penegak hukum, dan apabila para aparat desa bingung dalam proses pembangunan, agar langsung ditanyakan kepada aparat pengawas internal pemerintah setempat atau pendamping desa," tegasnya. ■

(Anchriso), Foto: Anchi/hr

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Memberatkan Perguruan Tinggi

Kehadiran beberapa Rektor perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia positif mendapat apresiasi dan sambutan hangat dari para legislator.

Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti dengan tegas mengatakan, setelah mendengar berbagai paparan yang disampaikan para Rektor tersebut, semakin meyakinkan bahwa Keberadaan Panja SN DIKTI itu ternyata memang sangatlah penting.

"Regulasi dari Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 itu ternyata sangat memberatkan perguruan tinggi, ini seperti tsunami perguruan tinggi. Kami merasa miris setelah kami mendengarkan paparan dari Universitas-universitas yang World Class Univercity. Kalau yang sekelas World Class Univercity saja seperti ini tanggapannya, lalu bagaimana dengan perguruan tinggi yang baru? karena regulasinya disamaratakan," tandas Marlinda di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/07/2017).

Ia menyatakan, harus ada diskresi bagi perguruan tinggi yang sudah dinyatakan sebagai World Class. Menurutnya selama ini Menristekdikti selalu mengatakan bahwa pihak kementerian telah melakukan pembinaan dari perguruan tinggi yang sudah mencapai World Class dengan bangganya. Padahal hal itu justru mempersulit dan menekan habis-habisan

perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut.

"Bagaimana mereka akan bekerja dengan cepat kalau regulasi-regulasi itu membuat mereka kemudian menjadi terhambat. Selain itu kita juga sudah defisit profesor, bahkan mungkin suatu saat kita sudah tidak ada profesor lagi, akibat adanya aturan-aturan yang sangat dipersulit," jelasnya saat RDPD Panja SN Dikti Komisi X DPR RI.

Sementara itu, dalam paparan salah seorang Rektor yang hadir, ia menyampaikan bahwa ketika berbicara tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT), maka peserta didik yang miskin itu harus ditolong. Seharusnya bagi yang memiliki kemampuan tinggi, diakomodasikan untuk dapat mensubsidi yang tidak mampu, namun justru kenyataannya tidak demikian.

"Ada dua hal yang membuat seseorang mau menurunkan martabatnya, yakni di bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, ketika masuk kalau bisa mendapat beasiswa, dibayari dan juga murah. Lalu di bidang kesehatan, ketika dilayani minta pelayanan kesehatan yang hebat, tetapi sesudah dilayani dan mengetahui besarnya tarif, kemudian minta pindah ke kelas yang lebih rendah," ujar



Anggota Komisi X DPR Marlinda Irwanti

salah seorang Rektor tersebut.

"Disatu sisi kita dibatasi oleh UKT, tetapi kita juga dituntut memiliki penelitian-penelitian yang hebat. Tidak mungkin kita memiliki penelitian yang hebat sementara kita juga dihambat oleh masalah regulasi. Publikasi Indonesia sering gagal di tingkat Internasional, karena penelitian-penelitian eksperimental itu menjadi ditolak sebab menggunakan alat yang sudah out of date. ■

(depi/so), Foto: Anchi/hr

UIN Mataram Diharapkan Kembangkan Ilmu Agama Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram resmi beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 34 Tahun 2017 bersama lima IAIN lainnya di Indonesia. Komisi VIII DPR RI mengharapkan UIN Mataram dapat mengembangkan ilmu agama islam yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Noor Achmad

Wakil Ketua Komisi yang membidangi peningkatan bagi kualitas dunia pendidikan keagamaan ini Noor Achmad mengatakan, UIN diharapkan dapat memberi manfaat, serta perubahan. "Nama IAIN menjadi UIN harus dibarengi dengan peningkatan kualitas. Hal ini tidak hanya sekedar berubah nama, akan tetapi juga harus ada perubahan pada beberapa hal mendasar, seperti kualitas SDM dan kualitas lulusan yang dihasilkan oleh UIN," jelasnya saat Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Provinsi NTB terkait optimalisasi peran Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sejalan dengan Peralihan Status IAIN Mataram menjadi UIN Mataram, di Mataram, Jum'at

(14/7/2017).

Kebijakan peralihan status UIN Mataram ini, lanjut politisi Golkar ini, dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu agama islam dengan berbagai rumpun ilmu pengetahuan.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa proses perubahan status itu memerlukan waktu yang cukup lama. Syarat menjadi UIN membutuhkan lebih dari 10 ribu mahasiswa. Saat ini total mahasiswa UIN Mataram ada 11 ribuan.

Dengan perubahan status menjadi UIN, berbagai upaya harus dilakukan untuk bisa berkontribusi bagi masyarakat. Diantaranya UIN Mataram membuka program studi pariwisata syariah pada tahun ini. Program

studi tersebut sesuai dengan posisi NTB yang telah menjadi daerah wisata halal.

"Meskipun nanti akan ada program studi umum, namun hal tersebut diharapkan tidak akan mengurangi nilai keagamaan yang menjadi ciri khas IAIN," tegasnya.

Dengan peralihan status ini IAIN bisa memiliki kualitas yang baik dalam bidang ilmu agama maupun ilmu umum. Untuk saat ini IAIN telah mendapatkan rekomendasi dari Kemenristek Dikti untuk membuka beberapa program studi umum.

Ada beberapa poin yang termuat dalam Perpres terkait perubahan status ini. Beberapa muatan yang termuat dalam Perpres itu diantaranya adalah tentang perubahan status IAIN menjadi UIN, status UIN nantinya tetap berada dibawah Kemenag.

Saat ini, jumlah program studi di IAIN Mataram sebanyak 27 dengan 3 fakultas, dengan tambahan tambahan program studi Pendidikan Agama Islam Multikulturalism di Pascasarjana UIN yang didirikan tahun 2016.

Ditegaskan Noor Achmad, bahwa lulusan yang dihasilkan UIN Mataram nantinya harus mampu bersaing dan mengambil bagian dalam proses pembangunan yang berlangsung, baik bidang pendidikan maupun pembangunan ekonomi dan pemerintahan.

Apalagi di era sekarang, dimana persaingan dalam berbagai bidang begitu kuat, sarjana lulusan Perguruan Tinggi (PT) tidak cukup hanya bermodalkan ijazah dan gelar, tapi juga keterampilan.

"Transformasi IAIN ke UIN yang sebelumnya telah melalui perjuangan panjang dan kajian komprehensif, harus disikapi dengan mampu berperan menciptakan perubahan dalam hal yang positif di tengah masyarakat," ujar politisi dapil Jawa Tengah II. ■



Pariwisata Humbahas Harus Ditunjang Pembangunan Infrastruktur

Banyaknya potensi pariwisata di Kabupaten Humbang Hasudutan, Provinsi Sumatera Utara, harus ditunjang dengan pemajuan pembangunan infrastruktur yang baik. Diharapkan nantinya akan menarik wisatawan untuk berkunjung, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena di sela-sela kunjungan kerja spesifik guna melakukan peninjauan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Humbang Hasudutan (Humbahas), Sumut, Kamis (13/7).

“Jika biasanya kita sebagai wisatawan hanya tahu destinasi Danau Toba, tapi ternyata ada potensi pariwisata lain di Kabupaten Humbahas yang bisa dikembangkan. Jika ini mau dikembangkan, maka harus ditunjang dengan infrastruktur yang baik,” ungkap politisi F-Demokrat tersebut.

Dalam kunjungan yang diikuti oleh perwakilan mitra kerja Komisi V DPR didampingi langsung Bupati Humbahas itu, mereka bersama-sama melihat kondisi infrastruktur khususnya bidang pariwisata yang ada di Kabupaten Humbahas. Menurut pantauan, tampak kondisi jalan

rusak parah. Melihat kondisi tersebut, Komisi V DPR berharap pembangunan infrastruktur pariwisata dapat segera dipercepat.

“Oleh karena itu, Komisi V DPR merasa perlu dan mendorong dalam anggaran tahun 2018. Secepatnya kami akan lakukan rapat dengan mitra dari Komisi V DPR terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam menunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Humbahas,” jelas politisi asal dapil Papua Barat itu.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi V DPR Anthon Sihombing. Politisi F-PG itu turut mendorong percepatan pembenahan infrastruktur pariwisata yang ada di Kabupaten Humbahas. Menurutnya, berbagai potensi yang ada di Humbahas, dipastikan menarik untuk dikunjungi wisatawan.

“Objek-objek wisata yang indah dan bersejarah sangat banyak di sini. Ada Danau Toba, arung jeram, kita juga bisa

melihat taman bunga yang sebelumnya juga sudah pernah dikunjungi oleh Presiden Jokowi, lalu ada makam Sisingamangaraja XII. Dengan panorama yang indah dan bersejarah itu, tentunya ini akan mengundang wisatawan untuk berkunjung. Maka dari itu pembangunan infrastruktur ini harus kita dorong,” papar politisi asal dapil Sumatera Utara itu.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor menilai kedatangan Tim Komisi V DPR merupakan sebuah momentum demi terselenggaranya pembangunan infrastruktur di daerah yang dipimpinnya.

“Oleh karena itu kami berharap, dengan adanya kunjungan Komisi V DPR ini, Kabupaten Humbahas bisa mendapatkan porsi anggaran yang pas dan tepat agar ekonomi masyarakat bisa berkembang dan meningkat di kemudian hari,” harapnya.

Turut SERTA dalam kunspek ini Anggota Komisi V DPR, diantaranya Saniatul Lativa (F-PG), Willem Wandik (F-PD), Hanna Gayatri (F-PAN), dan Sahat Silaban (F-Nasdem). ■

(tra.mp), Foto: Tiarahr



Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena saat memimpin Kunspek ke Kabupaten Humbang Hasudutan, Provinsi Sumatera Utara



Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa menyambut kedatangan Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD

Pansus Angket dan Mahfud MD Ingin Perbaiki KPK

Setelah mengundang beberapa pakar hukum tata negara, Pansus Angket KPK beranggapan telah mendapat berbagai macam perspektif dalam mengambil sikap untuk mengatasi kinerja KPK.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufikulhadi menyampaikan kehadiran Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APTHN-HAN), Mahfud MD, telah memperkaya sudut pandang pansus. Sebelumnya beberapa ahli telah dihadirkan di antaranya Yusril Ihza Mahendra dan Romli Atmasasmita.

“Yang paling penting bagi kita adalah, telah disampaikan tadi, di ruang ini telah menjadi saksi bahwasanya Prof, Mahfud telah menyampaikan pendapatnya dengan sangat meyakinkan, kami apresiasi. Juga di ruangan ini sebelumnya Profesor Yusril menyampaikan pendapatnya juga sangat meyakinkan. Dengan demikian dua profesor dan ahli tata negara telah hadir di sini memberikan pandangan, itu adalah memperkaya kami semuanya,” papar Taufik saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Angket KPK, di Ruang Rapat KK I Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017) sore.

Meski ada beberapa perbedaan sudut pandang dalam mensikapi kinerja KPK selama ini, namun Mahfud menyampaikan dalam presentasinya KPK saat ini membutuhkan perbaikan. Salah satu kesamaan sudut pandang Pansus KPK dengan Mahfud adalah ingin dijalkannya pemberantasan korupsi. “Di luar itu, ada banyak kesamaan. Pertama, prinsipnya kita ingin pemberantasan korupsi jalan, itu kesamaan,” ujar Mahfud.

Dia juga sependapat dengan Pansus Angket KPK, bahwa lembaga anti rasuah ini perlu perbaikan. “Pertama, prinsipnya kami ingin KPK itu baik. Pemberantasan korupsi itu jalan,” ujar Mahfud. Menurutnya, masih banyak cara untuk mengawasi kinerja KPK. Soal keabsahan Pansus Angket KPK, ia enggan berkomentar lebih jauh. “Kita nggak mutuskan legal atau tidak legal,” ujarnya.

Salah satu Anggota Pansus Angket KPK Arsul Sani berpendapat, kalau ada dugaan KPK salah dalam tata kelola keuangan dan anggaran negara bisa di-angket, namun merdeka dalam menjalankan peradilan dan menegakkan hukum, pernyataan ini berdasar pada konteks Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar.

“Bahwa angket ini sebatas untuk memperbaiki tata kelola, kami terus terang akan bersikap untuk menolak jika angket ini nanti melahirkan rekomendasi yang dalam tanda kutip yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu saya kasih contoh satu saja, misalnya merekomendasikan revisi Undang-Undang KPK yang bermaksud untuk membatasi umur KPK,” jelas Arsul. ■

(eko/sc), Foto: Iwan Armanias/hr

Implementasi DAK Kesehatan Masih Banyak Kendala

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri mengatakan, persoalan implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan masih mengalami banyak kendala. Salah satunya disebabkan tidak adanya integrasi perencanaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

“Sebaiknya Pemda Kabupaten tidak jalan sendiri-sendiri ke pusat. Sehingga terkesan tidak sinergitas dengan provinsi. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan antara provinsi dengan kabupaten,” kata Syamsul usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Wakil Gubernur Provinsi Bali Ketut Sudikerta di Kantor Bappeda Provinsi Bali, Jumat (14/07/17)

Politisi Golkar Dapil Sulsel II tersebut, menjelaskan, tujuan Panja DAK bidang Kesehatan Komisi IX DPR RI adalah untuk menyempurnakan sistem perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan pelaporan dari DAK bidang kesehatan tersebut.

Karena selama ini Komisi IX menilai, masih terdapat beberapa kelemahan implementasi daripada DAK tersebut, sehingga tidak tepat sasaran

Menurut Syamsul, terkait dengan pelaksanaan DAK bidang Kesehatan, permasalahannya adalah ketika dananya sudah cair, tapi tidak bersamaan dengan keluarnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian terkait yaitu Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Keuangan RI maupun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (BAPPENAS).

“Sehingga daerah itu tidak berani mengeksekusi program-program yang sudah mereka usulkan. Kalau sudah ada juklak dan juknisnya dahulu, sehingga ada kesiapan daerah untuk melaksanakan,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketut Sudikerta membenarkan bahwa terlambat dikeluarkannya juklak dan juknis sangat menghambat realisasi keuangan yang dilakukan secara bertahap.

“Hal itu cukup menyulitkan pihak pemerintah daerah dalam proses pembayarannya,” kata Ketut.

Karena pada hakikatnya, lanjut Ketut, aturan yang dibuat itu mengacu kepada aturan di pusat sehingga di Bali tidak bisa melaksanakan itu dengan seksama.

“Maka perlu dilakukan evaluasi, untuk itulah tadi mitra kerja kita dalam hal ini Pak Ketua Komisi IX DPR RI hadir di sini. Ini agar realisasi DAK itu bisa tepat waktu, tepat sasaran, serta hasilnya terarah dan terukur untuk kemajuan kesehatan masyarakat Bali,” ucapnya.

Turut mendampingi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja DAK bidang Kesehatan Komisi IX DPR RI antara lain Ribka Tjiptaning, Ketut Sustiawan, Imam Suroso (F-PDIP), Delia Pratiwi Br Sitepu, Andi Fauziah Pujiwati Hatta (F-PG), Sri Wulan (F-Gerindra), Ayub Khan, Aliyah Mustika Ilham (F-PD), Risky Sadig (F-PAN), Siti Masrifah (F-PKB), Anshory Siregar (F-PKS), Irma Suryani Chaniago, Amelia Anggraini (F-NASDEM), dan Frans Agung Mula Putra (F-HANURA). ■



Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri

(ndy/sc), Foto: Nadya/hr

Sekecil Apapun Saran Renstra DPR dari Kampus Akan Diperhatikan

Tim Kunjungan Kerja BURT DPR dipimpin Wakil Ketua Hasrul Azwar menyatakan sangat berterima kasih atas masukan dan saran dari Pemprov. Nusa Tenggara Timur (NTT) dan beberapa universitas tentang nilai-nilai dan tugas pokok serta fungsi DPR bagi penyusunan Renstra DPR ke depan.



Foto bersama BURT dengan jajaran Pemprov NTT dan kalangan Perguruan Tinggi NTT

“Sekecil apapun masukan dari kampus akan kami perhatikan. Masukan dari beberapa perguruan tinggi (PT) di NTT ini akan kami kompilasikan dengan masukan dari PT lainnya sebagai sumbangsih BURT untuk penyusunan Renstra 2019-2024,” jelas Hasrul dalam pertemuan dengan Pemprov

dan sejumlah PT di Kupang, Selasa (18/7).

Hadir dalam pertemuan ini Gubernur Frans Lebu Raya dan Asisten I Fernandes serta Wakil-wakil dari PT antara lain Universitas Nusa Cendana, Universitas Kristen Arta Wacana, Universitas Muhammadiyah dan Universitas Katolik Widya Mandia.

Selanjutnya Pimpinan BURT dari FPP ini mengapresiasi beberapa saran seperti meminta penguatan fungsi dan tugas pokok DPR lebih dikembangkan dan juga meminta ke depan para anggota tidak ada lagi yang bermasalah dengan hukum. Selain itu, beberapa PT juga menekankan bahwa roh DPR adalah aspiratif sehingga akan mendapatkan partisipasi dan dukungan publik. Satu hal lagi DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya memperjuangkan aspirasi rakyat tidak hanya pro kemiskinan dan mengatasi pengangguran saja tetapi juga pro inovasi.

Ketua Tim Hasrul Azwar menyambut baik agar DPR lebih pro inovasi dan perlu dikembangkan yang posisinya setingkat diatas kreasi. “Ini juga harus disosialisasikan oleh DPR dalam rangka mengembangkan demokrasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR,” ujarnya.

Saat ditanyakan apa yang bisa dilakukan dalam mewujudkan parlemen modern dalam waktu dekat ini, dia menjelaskan pihaknya ingin kegiatan dewan ke depan dapat dijangkau dari berbagai tempat di Indonesia ini. Misalnya ketika bahas anggaran atau RUU bisa cepat diakses lewat medsos atau bisa dilakukan siaran langsung oleh TV Parlemen. “Ini akan menciptakan transparansi dan membuat kedekatan DPR dengan rakyat,” kata Hasrul menambahkan. ■

(mp/sc) foto : Mesutur/hr

DPR Masih Berbeda Pendapat Terkait Perpu Ormas



Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana dan anggota Komisi III Nasir Jamil dalam forum legislasi

Sikap Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat RI terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembubaran Organisasi Masyarakat anti Pancasila masih berbeda pandangan.

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana menilai bahwa Perpu No.2 tahun 2017 tidak berpotensi menimbulkan otoritarianisme atau kesewenang-wenangan oleh pemerintah. Karena itu, masyarakat yang keberatan dengan Perpu



itu masih dipersilakan menggugat atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tak ada kekhawatiran menimbulkan kesewenang-wenangan dengan Perppu Ormas itu. Sebab, dalam era demokrasi ini tak dimungkinkan bersikap otoriter. Toh, masyarakat yang menolak silakan gugat ke MK, dan masih akan diproses di DPR RI,” tegas politisi Hanura itu dalam forum legislasi “Nasib Perppu Ormas Di DPR” bersama anggota Komisi III DPR FPKS Nasir Jamil dan Direktur Voxvol Center Pangi Syarwi Chaniago di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Menurut Dadang, kalau masyarakat

menilai Perppu itu bertentangan dengan konstitusi, maka silakan gugat ke MK dan itu konstitusional. “Jadi, tidak usah mencaci-maki pemerintah, Presiden RI, menteri, atau partai pendukung pemerintah,” ujarnya.

Sejauh itu kata Dadang, DPR masih akan membahas Perppu itu pada masa sidang mendatang setelah reses, sehingga komunikasi akan dilakukan antar fraksi. Hanura sendiri menerima Perppu itu, karena bertujuan menjaga kedaulatan NKRI. “Jadi, Perppu ini untuk kedaulatan negara,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil menilai jika soal Ormas itu sudah diatur dalam KUHP, tidak ada kekosongan hukum dan tak ada alasan

kegentingan yang memaksa. Untuk itu, FPKS menolak Perppu tersebut. “Kalau soal Ormas, suku, agama, ras dan antargolongan, penistaan agama dan sebagainya itu sudah diatur dalam KUHP,” tambahnya.

Pangi berharap ada pembinaan terhadap Ormas yang dicurigai anti Pancasila. “Jangan sampai tidak pernah dibina, tapi langsung digebuk karena dianggap anti Pancasila. Seperti halnya penutupan telegram akibat membuat terorisme. Untuk itu, kalau Perppu ini disahkan DPR, maka DPR bertanggung jawab,” ungkap politisi PKS itu. ■

(sc), Foto: Rumi/hr

Sampah Laut Menjadi Ancaman Baru Negara Asean

Sejumlah isu lingkungan di perairan kawasan menjadi sorotan tajam para delegasi Kaukus Antar Parlemen Asean atau Asean Inter - Parliamentary Assembly (AIPA) ke 9 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (18/7/2017). Diantaranya, mengenai pemutihan koral hingga pencemaran laut akibat sampah plastik (Marine Plastic Debris) yang dinilai berpotensi menjadi ancaman baru.



Anggota BKSAP DPR Hamdhani

Salah satu penelitian menunjukkan, jika produksi sampah plastik tidak bisa ditekan, maka pada tahun 2050, sampah plastik di laut akan lebih banyak dari jumlah ikan. Saat ini, sampah di laut dinilai membahayakan satwa laut. Seperti kasus plastik yang ditemukan di perut burung laut atau microplastic dijumpai pada ikan yang kita konsumsi.

Namun sangat disayangkan, negara-negara Asean merupakan kontributor terbesar produsen sampah plastik ukuran mikro ini. “Sehingga dalam pertemuan ini para delegasi ingin menyoal agar dibuat regulasi di negara masing-masing tentang pencemaran sampah plastik,” ungkap Anggota BKSAP Hamdhani.

Terkait hal itu, menurutnya, untuk menekan pencemaran sampah plastik, salah satu regulasi yang bisa ditempuh yaitu dengan mengolah sampah menjadi biodiesel atau liquid fertilizer.

Sisi lain, ia mengingatkan, pemerintah Indonesia juga sebelumnya menerapkan peraturan kantong plastik berbayar, meskipun akhirnya dihentikan setelah menuai pro kontra. Tapi, dirinya optimis, pemerintah dapat melakukan terobosan baru untuk menekan polusi sampah plastik. “Kami di DPR tetap konsisten bahwa persoalan sampah atau masukan dari delegasi negara lain dapat kita bicarakan bagaimana menyelesaikannya,” sambung Hamdhani.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, mengatakan persoalan sampah plastik telah menjadi ancaman baru di negara Asean.

Bahkan sampah plastik di laut Indonesia sempat menjadi sorotan dunia. Indonesia diklaim sebagai produsen polutan plastik kedua terbesar setelah China. Disusul negara Asean lainnya, yakni Filipina berada di urutan ketiga diikuti Vietnam.

“Ini adalah ancaman terbaru dan belum pernah terjadi di masa lampau yang sejauh ini kita tidak siap hadapi. Jadi, pada saat ini, kita mengonsumsi ikan-ikan yang memakan plastik, jika tidak berhati-hati maka akan ada dampak kesehatan yang belum terbayangkan pada saat ini,” jelas Arif Havas. ■

(ann/sc), Foto: Arif/hr



Suasana rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Kapolri dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan

Komisi III Minta Kapolri Tindak Tegas Ormas Anti Pancasila

Komisi III DPR RI meminta Polri untuk menindak tegas terhadap Ormas yang menyebarkan ajaran-ajaran anti Pancasila dan para pelaku hate speech yang mengganggu ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat.

Demikian menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Kapolri Tito Karnavian, yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

“Komisi III DPR RI juga mendesak kembali Kapolri untuk melakukan evaluasi secara komprehensif sistem pendidikan dan pembinaan Polri pada semua tingkat pendidikan di institusi Polri,” kata Trimedya.

Hal itu, tambah politisi F-PDI Perjuangan itu, dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Polri guna mewujudkan Polri yang profesional, humanis, bermoral, modern dan terpercaya.

“Kemudian, Komisi III DPR RI mengapresiasi dan mendukung

langkah Kapolri dalam pembentukan Densus Tipikor dengan anggaran dan kewenangan khusus, dan diharapkan dapat terrealisasi dalam satu tahun ke depan,” ujar politisi asal dapil Sumut itu.

Sebelumnya dalam sesi pendalaman, sejumlah Anggota Komisi III DPR mempertanyakan sejumlah isu, seperti kasus terorisme, narkoba hingga pemblokiran Telegram. Salah satu isu yang juga ditanyakan adalah rencana pensiun dini Tito Karnavian.

“Kami tergelitik isu opini di media, beredar bahwa saudara Tito berencana pensiun dini, kami mohon penjelasannya. Ini hoax atau apa?” kata Anggota Komisi III DPR Adies Kadir (F-PG).

Pertanyaan serupa juga dilontarkan Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding. Politisi F-Hanura itu menanyakan

latar belakang pensiun dini yang sempat diutarakan Tito, karena menurutnya kehadiran Tito memberikan warna pada Kepolisian di Indonesia.

“Ada pensiun dini, apa yang melatarbelakangi atau saudara merasa ada tekanan dalam menjalankan tupoksi atau dalam hal apa? Sementara kehadiran saudara bisa memberikan satu warna,” kata politisi asal dapil Sulteng itu.

Menanggapi pertanyaan itu, Tito menjelaskan bahwa wacana itu bermula saat dia ditanya oleh salah satu media televisi mengenai rencana ke depannya. Dari situ, ia mengaku memberi jawaban secara spontan dan natural.

“Spontan dan natural saja. Saya sampaikan bahwa hati kecil saya tidak ingin sampai selesai di tahun 2022. Tidak sehat untuk organisasi, itu membutuhkan penyegaran dan lain-lain. Kreativitas saya bisa menurun, saya bisa memberikan kesempatan kepada Kapolri lain,” jelas Tito.

Mantan Kepala BNPT itu juga menambahkan maksudnya tersebut bukan berarti ia akan melanjutkan kariernya di bidang politik seperti yang diisukan selama ini. Ia menegaskan tak tertarik untuk terjun di bidang politik.

“Apakah Pak Tito ingin masuk ke politik? Kapolri saja sudah banyak musuhnya, saya tidak tertarik pada politik dan saya hanya tertarik di dunia pendidikan,” imbuhnya. ■

(sf/sc), Foto: Andri/hr



Monitoring dan Evaluasi Distribusi Majalah-Buletin Parlementaria di Mataram, Prov. NTB

100 Persen Terkirim

Distribusi Majalah dan Buletin Parlementaria untuk wilayah Mataram, 100 Persen terkirim dan diterima dengan baik oleh pembaca, demikian di sampaikan Made Winata, Kepala Kantor Pos Mataram, Prov. NTB, di hadapan Tim Penerbitan Setjen dan BK yang melaksanakan kegiatan monitoring serta evaluasi (18/7)

Tim yang dipimpin Kabag Penerbitan, dalam pertemuan tersebut menyampaikan harapan agar tidak terjadi kendala teknis dalam proses pengiriman. “ Kami berharap *SOP Packaging* atau pengemasan bahan tercetak tetap sama antara satu daerah dengan daerah yang lain, jangan sampai pembaca menerima Majalah dan Buletin tersebut dalam keadaan rusak, yang pada akhirnya tidak dapat maksimal dibaca, “ujarnya.

Pada akhir pertemuan Made mengungkapkan keinginan agar setiap Kantor Pos yang ada di wilayah NTB juga memperoleh Majalah dan buletin dimaksud. “Selama ini kami hanya melakukan pengiriman, dimana bahan yang akan dikirim sudah terkemas dengan baik, kalau boleh kami minta dikirimkan majalah dan buletin dimaksud untuk dibaca dilingkungan kantor kami yang tersebar dan lumayan jumlahnya”, demikian pinta Made

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang juga dilaksanakan pada lingkungan Universitas Mataram mendapat respon yang sangat baik. “kami berharap Sekretariat Dewan bisa memberikan kiriman yang lebih banyak, karena minat para Mahasiswa terhadap majalah Dewan begitu besar, dan majalah serta buletin yang kami terima terasa sekali manfaatnya bagi pengetahuan kami tentang tugas tugas Dewan yang telah dilaksanakan, papar Muslimin, Kepala UPT Perpustakaan Universitas Mataram

Dalam pertemuan tersebut, pihak UPT Unram menyampaikan permohonan dukungan bahan baca bagi perpustakaan, “kami bersedia untuk membuat *Both* DPR RI, mungkin dalam bentuk kerjasama hal ini dapat ditindaklanjuti, asalkan secara rutin periodik kami juga mendapat pasokan bahan tercetak, agar *Both* DPR RI nantinya selalu *Update* dengan bahan atau naskah cetakan,” urai Muslimin.

Muslimin melanjutkan, “Jika kami diberikan kesempatan untuk berkunjung



Tim monitoring dan evaluasi distribusi Buletin dan Majalah Parlementaria Setjen DPR ke PT. Pos Indonesia Kanwil NTB (atas) dan UPT Perpustakaan Universitas Mataram, NTB (bawah)

ke Jakarta tentunya kami sangat berterima kasih, karena sudah pasti banyak manfaat keilmuan yang akan kami peroleh baik langsung ataupun tidak, mengingat demikian banyaknya bahan atau naskah cetakan yang diterbitkan di dalam lingkungan kesetjenan.

Mensikapi rencana kerjasama tersebut, Djustiawan selaku Pimpinan Penerbitan

menyambut baik ide atau gagasan dimaksud, “apa yang disampaikan oleh teman teman dari UPT Unram tentu akan kami sampaikan kepada Pimpinan kami di Jakarta, semoga ide baik tersebut dapat disetujui dan dilaksanakan,” ujarnya. ■

(TIM PENERBITAN)



Rapat pergantian Pimpinan BKSAP DPR oleh Wakil Ketua Bidang Korpolkam Fadli Zon. Kamis (20-07), foto : Jaka Nugraha/hr

Komisi VIII DPR rapat konsultasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rabu (19-07), foto : Andri/hr



Rapat Paripurna tentang pengesahan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Kamis (20-07), foto : arief/hr